

AKSI UNJUK RASA DAN MASA DEPAN PRANCIS

Poltak Partogi Nainggolan

7

Abstrak

Prancis tengah dilanda demonstrasi masif berkepanjangan sejak pertengahan November 2018. Demonstrasi bermula dari keputusan Presiden Macron menaikkan pajak bahan bakar minyak (BBM) yang menyulut kemarahan rakyat Prancis, khususnya kalangan pekerja, pemuda, dan mahasiswa, yang mengancam prospek pemerintahan Macron. Kultur masyarakat Prancis yang revolusioner telah menimbulkan kekhawatiran Uni Eropa (UE) atas dampaknya bagi stabilitas kawasan. Kajian ini membahas demonstrasi dalam perspektif sejarah Prancis dan implikasi regional yang ditimbulkannya. Analisis menggunakan pendekatan international political economy, dengan menggunakan negara dan pemerintahan serta sikap dan respons individual pemimpin-pemimpin sebagai satuan analisis. Data dengan sumber dwi bahasa melengkapi analisis. Kajian ini memberi pelajaran bagi (pemimpin) Indonesia agar lebih hati-hati dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang berdampak pada rakyat.

Pendahuluan

Situasi dalam negeri Prancis akhir-akhir ini telah diwarnai aksi unjuk rasa berkepanjangan. Menjelang 2 tahun berkuasa, Presiden Emmanuel Macron dinilai tidak peduli terhadap warga biasa, sekalipun ia diusung Partai Sosialis. Ia dinilai telah mengkhianati janjinya untuk mereformasi ekonomi Prancis dan pasar kerja, karena kehidupan semakin sulit dirasakan rakyat, terutama dengan peningkatan pajak BBM, walaupun menurut pakar globalisasi, Joseph Stiglitz, sebagai sebuah kebijakan

sebenarnya pro-lingkungan (*The Jakarta Post*, 09 Januari 2019).

Demonstrasi masif dan kontinu digerakkan oleh mereka yang menyebut diri sebagai 'Gilets Jaune' atau 'Yellow Vests' ('Rompi Kuning'), yang dimulai pada 17 November 2018 dan berlanjut pada tanggal 15, 22, dan 23 Desember 2018, serta berulang sampai tutup tahun 2018 serta tanggal 7 dan 12 Januari 2019. Demonstrasi terjadi tidak hanya di pusat ibukota Prancis, Paris, namun juga kota-kota besar seperti Marseille, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Saint-Etienne,



Tabel 1. Pelaku Demonstrasi di Prancis dan Jumlah Korban

Peristiwa Demonstrasi	Jumlah Demonstran (orang)	Korban Meninggal (orang)	Korban Terluka (orang)	Pelaku Demonstran Ditahan (orang)
17 November 2018	282.000	1	409	73
24 November 2018	166.000	-	84	307
1 Desember 2018	136.000	1	263	630
8 Desember 2018	136.000	-	118	1.723
15 Desember 2018	125.000	2	-	1.220
22 Desember 2018	66.000	1	-	-
23 Desember 2018	38.600	-	220	81
6 Januari 2019	50.000	10	-	-
12 Januari 2019	84.000	10	-	-

Data diolah dari Koran Sindo (7 Januari 2019) dan France 24 (13 Januari 2019).

Perpignan, dan Rouen, yang ditandai berbagai aksi kekerasan dan anarkis.

Gelombang demonstrasi baru terjadi pada 6 Januari 2019, di sejumlah kota di Prancis, melibatkan 50.000 orang, terutama kaum perempuan (*Koran Sindo*, 07 Januari 2019). Namun, posisi Presiden Macron belum goyah, dan ia mengancam para demonstran itu sebagai pemberontak (*Koran Jakarta*, 08 Januari 2019). Untuk mencegah dampak buruk lebih luas, kawasan Menara Eiffel dan Champs-Elysees ditutup dan pemerintah mengerahkan kendaraan lapis baja dan menembakkan gas air mata, sedangkan para demonstran melakukan berbagai aksi perusakan dan pembakaran.

Aktor yang terlibat dalam demonstrasi beragam dan meluas, dari semula para pembayar pajak dari kalangan pekerja (industri) dan kelas menengah, kemudian diikuti oleh kaum perempuan, para pemuda, dan mahasiswa. Mereka tidak hanya memprotes,

tetapi marah dengan kebijakan dan kinerja pemerintahan Presiden Macron yang belum 2 tahun berkuasa. Gelombang demonstrasi mengakibatkan korban berjatuh, sebagaimana terlihat dalam tabel 1.

Dikhawatirkan demonstrasi tersebut akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan, serta prospek ekonomi Prancis dan Eropa, karena negeri itu, bersama Jerman, merupakan lokomotif ekonomi UE. Tulisan ini mengkaji bagaimana peran unjuk rasa dalam perspektif bangsa Prancis, dan implikasi demonstrasi yang kontinu bagi prospek Prancis dan keamanan regional.

Antara Mempertahankan Kebebasan dan Anarkisme

Mengapa rakyat Prancis berunjuk rasa? Ketidakpuasan terhadap sistem politik yang berlangsung dan kinerja serta perlakuan rezim yang berkuasa terhadap rakyatnya menjadi alasan dasar orang turun ke jalan untuk mengekspresikan sikap. Jika aksi

massa tahun 1789 berakibat pada runtuhnya kekuasaan Raja Louis XIV, di tahun 1968 Presiden Charles de Gaulle selamat dari kejatuhan, karena komprominya terhadap tuntutan mahasiswa. Kedua kejadian itu sering dirujuk oleh para penggerak aksi demonstrasi di Prancis dalam berbagai tuntutan yang disampaikan, khususnya oleh mahasiswa. Para pelaku demonstrasi *Gilets Jaune* juga menulis '*Mai 1968*' di belakang rompi mereka.

Kebijakan Macron memperlemah peraturan perburuhan, memangkas pajak barang mewah, dan memberlakukan pajak BBM, dengan menaikkan harganya, menciptakan masalah besar. Macron dituduh membela kepentingan kaum kaya Prancis, apalagi dengan keputusannya pasca-demonstrasi 15 Desember 2018, yang tetap tidak ingin menaikkan pajak bagi mereka. Ia dikecam karena mengelola Prancis seperti sebuah negara kecil sekelas Singapura, dan melupakannya sebagai sebuah negara sumber revolusi. Masa lalunya sebagai bankir diduga menjadi sumber ketidakpekaannya.

Tuntutan para demonstran *Gilets Jaune* adalah pencabutan pajak hijau BBM jenis diesel dan peningkatan upah minimum kerja. Mereka menginginkan gaji dinaikkan, uang pensiun meningkat, dan sebaliknya, pajak diturunkan, serta biaya hidup dapat ditekan pemerintah dan syarat untuk memasuki universitas bisa dipermudah. Demonstrasi yang pada mulanya dilakukan dengan sepeda motor dan rompi kuning di jalan-jalan di kota-kota besar di Prancis, mampu menarik simpatisan ratusan ribu

warga Prancis lainnya secara cepat untuk bergabung, menjadi sebuah gelombang demonstrasi besar dan kontinu, yang memperoleh dukungan 72% rakyat, terutama kaum perempuan, pemuda dan mahasiswa yang telah dikorbankan masa depannya oleh kebijakan Macron.

Unjuk Rasa dan Prospek Prancis

Unjuk rasa terburuk dan krisis politik terbesar Prancis dalam beberapa tahun terakhir sempat berhenti setelah Macron menunda kenaikan harga BBM, selain memberikan prioritas utama bagi pengadaan jaminan keamanan sosial masyarakat. Presiden Prancis tersebut tidak punya pilihan, selain memutuskan akan menaikkan upah minimum sebesar 7% atau €100 (Rp1,6 juta) per bulan setelah tahun 2019, yang akan ditanggung pemerintah. Kenaikan pajak bagi warga Prancis pensiunan dengan berpenghasilan rendah akan dibatalkan, dan upah lembur tidak akan dikenakan pajak lagi. Sedangkan pengusaha akan didorong untuk membayar bonus akhir tahun bebas pajak kepada karyawan, sehingga untuk kabinet, demonstrasi telah menjadi 'bencana ekonomi' (*France 24*, 30 Desember 2018).

Akibat tidak puas dengan sikap Macron, tuntutan demonstran diperluas dengan pembubaran parlemen dan melaksanakan pemilu baru. Para pengunjuk rasa menuntut Macron mundur-- '*Macron demission*,' seperti dalam coretan grafiti di Arc de Triomphe (*New York Times*, 29-30 Desember 2018). Dari semula gerakan protes,

aksi *Gilets Jaune* berkembang menjadi gerakan politik untuk menjatuhkan Presiden Macron. Penggerak *Gilets Jaune* adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota Prancis, yang kesulitan menjangkau kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa pemimpin resmi, dengan memanfaatkan media sosial, tidak sulit bagi mereka untuk beraliansi dengan kelas menengah dan kelas pekerja yang frustrasi dengan standar hidup mereka yang terus menurun.

Aksi *Gilets Jaune* yang meluas dan bertahan menyerupai kelompok penekan permanen, sehingga dimanfaatkan partai-partai kanan jauh (*l'extreme droit*) maupun kiri jauh (*l'extreme gauche*) yang kurang mendapat dukungan rakyat dalam pemilu. Mereka memanfaatkan energi gerakan protes massa yang besar ini (Nossiter, 2018). Kekuatan oposisi memanfaatkan ketidakpuasan besar yang terjadi di masyarakat, yang diakui Macron setelah 40 tahun terakhir, Prancis mengalami kelesuan, termasuk di desa-desa, dengan merosotnya layanan publik dan memburuknya kehidupan. *Gilets Jaune* mendapat angin baru, karena banyak pihak memanasakan situasi, mengingat respons Macron masih setengah hati, baru solusi jangka pendek, padahal ia bisa melakukan lebih dari itu.

Demonstrasi berlarut-larut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pebisnis dan mitra Prancis di Uni Eropa (UE). Logis, para demonstran berhasil menekan Presiden Prancis untuk membuat 'catatan penyesalan' dan 'kontrak nasional' baru, berkat ancaman yang mereka berikan, yakni desakan

untuk melaksanakan pemilu baru. Argumen Macron menaikkan pajak BBM untuk mendanai investasi energi terbarukan terpaksa harus dikoreksi. Dalam pesan tahun barunya, ia bertekad memperbaiki keadaan, sambil berharap rakyatnya bisa bersikap realistis (*France 24*, 1 Januari 2019).

Implikasi demonstrasi masif dan kontinu juga telah menimbulkan komplikasi. Presiden AS Donald Trump, yang mengomentarnya sebagai akibat Kesepakatan Iklim Paris, mulai mengganggu hubungan Prancis-AS, yang sebelum ini, Macron sudah menunjukkan sikap asertif terhadap Trump. Munculnya opini dari Rusia dalam 600 akun *Twitter* memperkeruh suasana. Menlu Jean-Yves Le Drian segera merespons ucapan Trump dengan mengingatkan bahwa demonstrasi masif itu masalah domestik Prancis. Sementara itu Menteri Keuangan Bruno Le Maire mengingatkan demonstrasi masif yang kontinu telah menjadi bencana bagi sektor bisnis.

Para pemimpin UE cemas bahwa demonstrasi yang berkepanjangan di Prancis akan menjalar dan ditiru oleh negara anggota lainnya untuk menentang kebijakan pemerintah nasional masing-masing yang tidak dapat memuaskan mayoritas rakyat mereka. Posisi Prancis dinilai penting bersama Jerman sebagai pendulum kemajuan UE. Gelombang demonstrasi di Prancis yang bisa memicu aksi serupa di negara-negara UE lainnya akan menyebabkan kehancuran dan akhir dari Eropa.

Penutup

Perjalanan sejarah Prancis dalam era feodal hingga dewasa ini telah memperlihatkan peran unjuk rasa yang mampu menjatuhkan rezim penguasa serta mengoreksi kebijakan dan keadaan. Sikap Presiden Macron yang telah memutuskan kenaikan pajak BBM telah meningkatkan kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat Prancis, terutama kalangan pekerja dan kelas menengah serta pemuda dan mahasiswa, dan memicu kemarahan mereka. Macron gagal memahami karakteristik masyarakat Prancis yang revolusioner sejak jaman feodal. Ia terlalu meremehkan aksi unjuk rasa masif yang timbul berkepanjangan akibat kebijakannya, sebelum kemudian membatalkannya setelah mengancam pemerintahannya. Demonstrasi yang belum berhenti itu telah menimbulkan kekhawatiran para pemimpin UE atas dampaknya terhadap stabilitas politik dan ekonomi Eropa, sehingga harus disikapi Macron.

Indonesia harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami Prancis dan Presiden Macron, dengan lebih hati-hati dalam meluncurkan kebijakan terkait dengan kenaikan harga BBM dan penanganan kesulitan ekonomi yang bertumpuk dan belum teratasi. Sekalipun rakyat Indonesia dewasa ini tidak serevolusioner rakyat Prancis mengingat tingkat kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat masing-masing berbeda, namun kenaikan harga dan inflasi dapat membahayakan stabilitas politik dan ekonomi domestik serta masa depan rezim yang berkuasa. Tingkat kepekaan pemimpin juga

membedakan respons mereka terhadap krisis domestik yang terjadi. Tingkat kepercayaan pada pemerintah yang berbeda juga menjelaskan mengapa Presiden Indonesia tidak terus-menerus digoyang berbagai aksi unjuk rasa masif. Tetapi, demonstrasi dalam jangka panjang di Prancis dapat mengganggu upaya Pemerintah Indonesia untuk bisa memanfaatkan peluang ekspor lebih banyak di negeri itu.

Referensi

- Fouquet, Helene and William Horobin, "France's Macron caps off annus horribilis," *The Jakarta Post*, 2 Januari 2019, hal. 12.
- Friedman, Thomas L. "Envisioning the demise of Europe." *The New York Times*, 20 Desember, 2018, hal. 1 dan 15.
- Gillis, Justin. "Forget the carbon tax for now," *The New York Times*, 29-30 Desember 2018, hal. 9.
- Massot, Jean. *La Presidence de la Republique en France*. Paris: Conseil d'etat, 1977.
- Mohamad, Goenawan. "Buazizi." *Majalah Tempo*, 6 Januari 2019.
- Nossiter, Adam. "What next for Yellow Vests," *The New York Times*, 26 Desember 2018, hal. 3.
- "Paris Kembali Rusuh," *Koran Sindo*, 7 Januari 2019, hal. 12.
- Prost, Yannick. "L'anne 2018 a revele le grand malaise de la jeunesse francaise," *The Conversation*, 31 Desember 2018.
- "Rompi Kuning Kembali ke Jalan: PM Prancis Belum Goyah." *Rakyat Merdeka*, 7 Januari 2019, hal. 1 dan 9.
- Stiglitz, Joseph E. "From 'yellow vests' to Green New Deal." *The Jakarta Post*, 9 Januari 2019, hal. 2.

“Unjuk Rasa di Prancis: “Jaket Kuning” Terobos Kantor Kementerian,” *Koran Jakarta*, 8 Januari 2019, hal. 8.



Poltak Partogi Nainggolan
partogi.nainggolan@dpr.go.id
pptogin@yahoo.com

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan *judicium magna cumlaude*. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kemitraan Strategis Indonesia- Amerika Serikat - RRC di Asia Pasifik” (2013), "Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis" (2015), "Ancaman Keamanan terhadap ALKI" (2015), dan "Indonesia di Tengah Persaingan China, Jepang, dan India" (2017)

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.